



GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara merupakan salah satu upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik demi tercapainya reformasi birokrasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/11749/Keuda tentang Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

7. Undang-Undnag...../3

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dihapus.
- (2) TPP diberikan kepada ASN setiap bulan berdasarkan Kelas Jabatan pada Perangkat Daerah yang pembayarannya dilaksanakan paling lama setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
- (3) Nama jabatan, Kelas Jabatan dan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II...../4

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 11 Juli 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire  
pada tanggal 11 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 009

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP. 197606082002121002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH  
 NOMOR 8 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 PAPUA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
 PAPUA TENGAH

KELAS JABATAN STRUKTURAL

No.	Nama Jabatan	Unit Kerja Eselon II	Unit Kerja Eselon III	Unit Kerja Eselon IV	Jenis Jabatan	Kelas	Total/bln/All Jab (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sekretaris Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	JPT	16	80.000.000
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	JPT	15	45.000.000
3.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat	JPT	14	40.000.000
4.	Kepala Bagian Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	JA	12	30.000.000
5.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Pemerintahan	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah	JP	9	15.000.000

6.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerja Sama	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Pemerintahan	Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerja Sama	JP	9	15.000.000
7.	Kepala Sub Bagian Pengelola Perbatasan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Pemerintahan	Sub Bagian Pengelola Perbatasan Daerah	JP	9	15.000.000
8.	Kepala Bagian Otonomi Khusus	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Otonomi Khusus	Bagian Otonomi Khusus	JA	12	30.000.000
9.	Kepala Sub Bagian Administrasi Daerah dan DPRD	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Otonomi Khusus	Sub Bagian Administrasi Daerah dan DPRD	JP	9	15.000.000
10.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Khusus dan Penataan Urusan	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Otonomi Khusus	Sub Bagian Pengembangan Otonomi Khusus dan Penataan Urusan	JP	9	15.000.000
11.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Otonomi Khusus	Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	JP	9	15.000.000
12.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Otonomi Khusus	Sub Bagian Tata Usaha	JP	9	15.000.000
13.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	JA	12	30.000.000
14.	Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sub Bagian Bina Mental Spiritual	JP	9	15.000.000
15.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	JP	9	15.000.000
16.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	JP	9	15.000.000
17.	Kepala Sub Bagian Perpustakaan	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sub Bagian Perpustakaan	JP	9	15.000.000

18.	Kepala Biro Hukum	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Hukum	Biro Hukum	JPT	14	40.000.000
19.	Kepala Bagian Perundang-undangan Provinsi	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Perundang-undangan Provinsi	Bagian Perundang-undangan Provinsi	JA	12	30.000.000
20.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum dan Pengaturan Perdasus dan Perdasi	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Perundang-undangan Provinsi	Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum dan Pengaturan Perdasus dan Perdasi	JP	9	15.000.000
21.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Perundang-undangan Provinsi	Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan	JP	9	15.000.000
22.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Perundang-undangan Provinsi	Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya	JP	9	15.000.000
23.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota	Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota	JA	12	30.000.000
24.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Wilayah I	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota	Sub Bagian Produk Hukum Wilayah I	JP	9	15.000.000
25.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Wilayah II	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota	Sub Bagian Produk Hukum Wilayah II	JP	9	15.000.000
26.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Wilayah III	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota	Sub Bagian Produk Hukum Wilayah III	JP	9	15.000.000
27.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Bantuan Hukum	Bagian Bantuan Hukum	JA	12	30.000.000
28.	Kepala Sub Bagian Litigasi	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Bantuan Hukum	Sub Bagian Litigasi	JP	9	15.000.000
29.	Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Bantuan Hukum	Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia	JP	9	15.000.000

30.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Bantuan Hukum	Sub Bagian Tata Usaha Biro	JP	9	15.000.000
31.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan,	SEKRETARIAT DAERAH	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan,	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan,	JPT	15	45.000.000
32.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	JPT	14	40.000.000
33.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	JA	12	30.000.000
34.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	JP	9	15.000.000
35.	Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	JP	9	15.000.000
36.	Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	JP	9	15.000.000
37.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	JA	12	30.000.000
38.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	JP	9	15.000.000
39.	Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sub Bagian Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	JP	9	15.000.000

40.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sub Bagian Tata Usaha	JP	9	15.000.000
41.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	JA	12	30.000.000
42.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	JP	9	15.000.000
43.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	JP	9	15.000.000
44.	Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	JP	9	15.000.000
45.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	JPT	14	40.000.000
46.	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	JA	12	30.000.000
47.	Kepala Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro dan Mikro	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro dan Mikro	JP	9	15.000.000

48.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sub Bagian Sumber Daya Alam	JP	9	15.000.000
49.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sub Bagian Tata Usaha	JP	9	15.000.000
50.	Kepala Bagian BUMD dan BLUD	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian BUMD dan BLUD	Bagian BUMD dan BLUD	JA	12	30.000.000
51.	Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian BUMD dan BLUD	Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	JP	9	15.000.000
52.	Kepala Sub Bagian BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian BUMD dan BLUD	Sub Bagian BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	JP	9	15.000.000
53.	Kepala Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian BUMD dan BLUD	Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah	JP	9	15.000.000
54.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	JA	12	30.000.000
55.	Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Administrasi Pembangunan	Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	JP	9	15.000.000
56.	Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Administrasi Pembangunan	Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	JP	9	15.000.000
57.	Kepala Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Administrasi Pembangunan	Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	JP	9	15.000.000

58.	Asisten Bidang Administrasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH	Asisten Bidang Administrasi Umum	Asisten Bidang Administrasi Umum	JPT	15	45.000.000
59.	Kepala Biro Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Organisasi	Biro Organisasi	JPT	14	40.000.000
60.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	JA	12	30.000.000
61.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	JP	9	15.000.000
62.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	JP	9	15.000.000
63.	Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sub Bagian Analisis Jabatan	JP	9	15.000.000
64.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	JA	12	30.000.000
65.	Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Sub Bagian Reformasi Birokrasi	JP	9	15.000.000
66.	Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja	JP	9	15.000.000
67.	Kepala Sub Bagian Budaya Kerja	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Sub Bagian Budaya Kerja	JP	9	15.000.000
68.	Kepala Bagian Tatalaksana	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Tatalaksana	Bagian Tatalaksana	JA	12	30.000.000
69.	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Tatalaksana	Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan	JP	9	15.000.000

70.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Tatalaksana	Sub Bagian Pelayanan Publik	JP	9	15.000.000
71.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Tatalaksana	Sub Bagian Tata Usaha	JP	9	15.000.000
72.	Kepala Biro Umum	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Umum	Biro Umum	JPT	14	40.000.000
73.	Kepala Bagian Rumah Tangga	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Rumah Tangga	Bagian Rumah Tangga	JA	12	30.000.000
74.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Rumah Tangga	Sub Bagian Rumah Tangga Gubernur	JP	9	15.000.000
75.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Wakil Gubernur	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Rumah Tangga	Sub Bagian Rumah Tangga Wakil Gubernur	JP	9	15.000.000
76.	Kepala Sub Bagian Urusan Dalam	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Rumah Tangga	Sub Bagian Urusan Dalam	JP	9	15.000.000
77.	Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda	Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda	JA	12	30.000.000
78.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Setda	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda	Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Setda	JP	9	15.000.000
79.	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset Setda	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda	Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset Setda	JP	9	15.000.000
80.	Kepala Sub Bagian Penggunaan Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Setda	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda	Sub Bagian Penggunaan Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Setda	JP	9	15.000.000
81.	Kepala Sub Bagian Kearsipan	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda	Sub Bagian Kearsipan	JP	9	15.000.000

82.	Kepala Bagian Administrasi Pimpinan	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Administrasi Pimpinan	Bagian Administrasi Pimpinan	JA	12	30.000.000
83.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Administrasi Pimpinan	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	JP	9	15.000.000
84.	Kepala Sub Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Administrasi Pimpinan	Sub Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan	JP	9	15.000.000
85.	Kepala Sub Bagian Protokol	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Administrasi Pimpinan	Sub Bagian Protokol	JP	9	15.000.000
86.	Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	JP	14	45.000.000
87.	Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	JP	14	45.000.000
88.	Staf Ahli bidang Pengembangan Otonomi Khusus	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	JP	14	45.000.000
89.	Sekretaris Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	SEKRETARIAT DAERAH	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	JA	9	15.000.000
90.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	JPT	15	45.000.000
91.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH	Bagian Umum dan Keuangan	Bagian Umum dan Keuangan	JA	12	30.000.000
92.	Kepala Sub Bagian Program dan keuangan	SEKRETARIAT DEWAN	Bagian Umum dan Keuangan	Sub Bagian Program dan keuangan	JP	9	15.000.000